



PERANCANGAN APLIKASI “*VILLAGE ENTREPRENEURSHIP*” UNTUK MENINGKATKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DES)

Lia Farokhah¹⁾, Yudistira Arya Sapoetra²⁾

¹⁾ Teknik Informatika, STMIK ASIA Malang
Email : farokhah@asia.ac.id

²⁾ Teknik Informatika, STMIK ASIA Malang
Email : yuditstiraarya@gmail.com

Abstrak

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia sedang digiatkan, khususnya di wilayah pedesaan. Program pengentasan tersebut salah satunya berupa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), program ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Bagi pemerintah, BUM Des dapat menyalurkan modal kerja yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi yang ada di desa serta mengurangi masalah urbanisasi yang semakin tinggi dan kaum produktif yang tidak betah di desa karena kurangnya pekerjaan. Untuk memaksimalkan program BUM Des, program ini membutuhkan peran pihak ketiga dimana biasanya disebut *investor* profit maupun non profit dalam meningkatkan permodalan dan menambah perputaran ekonomi di desa. Perancangan aplikasi *village entrepreneurship* ini diharapkan dapat menjembatani antara program pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), dengan pihak swasta yang akan menaruh modal kepada para kelompok di setiap desa yang produktif, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencari sasaran kemana modal tersebut akan diberikan dan menjembatani kebutuhan investor yang terkadang tidak mempunyai waktu atau ide usaha tetapi mempunyai modal. Disisi lain, penduduk desa yang memiliki waktu dan potensi tetapi masih memiliki keterbatasan modal untuk pengembangan. Sistem ini akan membantu mengentaskan permasalahan kemiskinan yang ada di desa dan membangun sistem usaha yang berkelanjutan sehingga pada akhirnya membantu terwujudnya program pemerintah untuk menguatkan dan memandirikan ekonomi desa.

Kata kunci: *Badan Usaha Milik Desa, kemiskinan, permodalan, sistem informasi*

Abstract

Currently, Poverty reduction programs in Indonesia are being intensified, especially in rural areas. One of the Reducing Program is by establishing a Village Owned Enterprises (BUM Des), the program is designed to increase the participation of villagers who are expected to improve their standard of living and prosperity. For the government, BUM Des can channel working capital that can be used to increase the potential of the village and reduce the problem of increasing urbanization and productive people who are not at home in the village due to lack of employment. To maximize the BUM Des program, this program requires a third party role which is usually called profit or non profit investor in increasing capital and increasing economic rotation in the village. The design of village entrepreneurship application is expected to bridge between government programs is a Village Owned Enterprises (BUM Des) with private parties that will capitalize on groups in every productive village, which can be used as a tool to find out where the capital will be provided and bridge the needs of investors who sometimes do not have time or business ideas but have capital. On the other hand, villagers who have the time and potential but still have limited capital for development. This system will assist in alleviating the problems of poverty in the village and establishing a sustainable business system that ultimately helps to establish a government program to strengthen and stabilize the village economy.

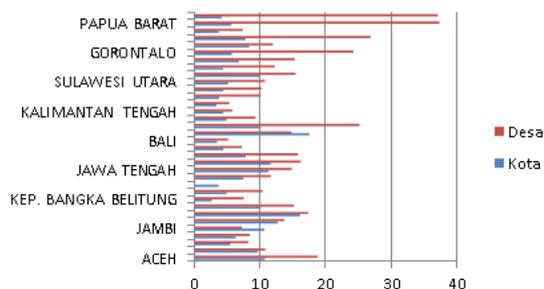
Keywords: *Village Owned Enterprise, poverty, capital, information system*

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan klasik yang terjadi hampir diseluruh belahan dunia manapun. Hal ini terjadi baik dinegara miskin, berkembang maupun maju walaupun porsinya berbeda. Suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata - rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2005).

Dalam suatu Negara ada pembagian wilayah yaitu desa dan kota. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Prof. Drs. Widjaja, HAW, 2003). Kota adalah sebuah sistem, baik secara fisik maupun sosial ekonomi, bersifat tidak statis yang sewaktu-waktu dapat menjadi tidak beraturan dan susah dikontrol. (Prof. Dr. Ir. Zoe'raini Djamal Irwan, 2004 ; 31)

Di Indonesia, tingkat kemiskinan banyak terjadi di wilayah desa dari pada di wilayah kota. Hal ini bisa dilihat dari data statistik tahun 2016 tentang prosentase penduduk miskin berdasarkan provinsi yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS).Hal ini digambarkan pada diagram chart pada gambar 1.



Gambar 1 Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi tahun 2013-2016

Berdasarkan data pada Gambar 1 tingkat kemiskinan desa terjadi hamper di seluruh wilayah yang disurvei. Masalah kemiskinan yang ada di setiap wilayah di Indonesia khususnya di desa harus segera ditangani. Disisi lain, di wilayah Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu anggota organisasi tersebut, memiliki program MEA. MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan seluruh ekonomi di wilayah Asia Tenggara, MEA sudah dimulai sejak 1997, Sistem MEA adalah sistem ini membentuk pola perdagangan bebas antar Negara-negara di Asia Tenggara. Dalam perkembangan MEA yang sudah bisa kita rasakan saat ini yaitu datangnya banyak tenaga asing yang bekerja di Indonesia, membuat pemerintah harus segera menangani masalah kemiskinan khususnya di desa supaya daya saing masyarakat Indonesia tidak semakin rendah dan melemah.

Permasalahan sering ditemui di daerah pedesaan yang terjadi dalam bidang usaha dan pekerjaan adalah masyarakat desa banyak yang urbanisasi dan meninggalkan desa untuk bekerja dikota sehingga desa ditinggalkan kaum produktif dan pengelolaannya semakin rendah. Selain itu, desa memiliki potensi terutama tenaga, sumber daya alam dan waktu yang tidak terkelola dengan baik, disisi lain ada para pemodal yang memiliki uang pasif dan bingung ingin melakukan usaha tetapi terbentur akan waktu, ide, sumber daya alam, dan tenaga yang ada. Disisi lain, ada usaha dari pemerintah untuk meningkatkan unit terkecil dari Negara yaitu desa dengan membuat program badan usaha milik desa (BUM Desa). Program ini dilandasi oleh aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1), dari beberapa permasalahan tersebut maka akan dirancang sebuah sistem yang dapat mempertemukan antara pemilik modal



dengan desa produktif yang memiliki potensi yang tinggi.

Pemodal dapat mencari desa yang mempunyai rating kepuasan yang paling tinggi, dimana di dalamnya akan terdapat banyak usaha dan kelompok yang ada dengan riwayat proyek yang pernah diterima. Untuk menjaga siklus sistem yang ada di desa, aplikasi ini berbasis level keuntungan dimana semakin kelompok tersebut membuat proyek semakin sukses, keuntungan yang akan diterima semakin besar. Hal ini diharapkan dapat menjaga siklus program BUM Desa tetap berjalan dan potensi desa semakin berkembang. Modal dari pemerintah dan modal swasta untuk membuat program bisa berjalan jauh lebih cepat. Aplikasi ini ditujukan untuk mendukung program pemerintah yaitu BUM Desa. Penelitian ini bisa menjadi percontohan nasional untuk desa-desa di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengembangan aplikasi “Village Entrepreneurship” untuk meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).
2. Evaluasi hasil purwarupa rancangan aplikasi “Village Entrepreneurship” untuk memperoleh umpan balik desain yang telah dirancang.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Memberikan rekomendasi desain aplikasi “Village Entrepreneurship” untuk membantu program pemerintahan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
 2. Mengetahui timbal balik pengujian purwarupa desain aplikasi yang telah dibuat

II. KAJIAN LITERATUR

2.1 Gambaran umum Bumdes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah *lembaga usaha desa*

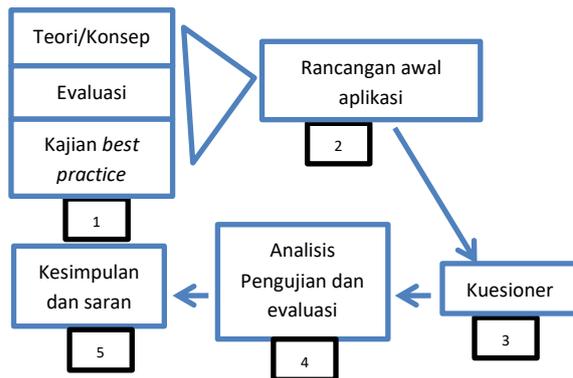
yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
 2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
 3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
 4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
 5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
 6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
 7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).
- ### 2.2. Tujuan Bumdes
- 1 Meningkatkan perekonomian desa;
 - 2 Meningkatkan pendapatan asli desa;
 - 3 Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - 4 Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.
- ### 2.3 Stakeholder Bumdes
- Adapun stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan BUM Des adalah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, Dewan Komisaris, Bagian Keuangan, Manajer BUMDes, Sekretaris, Bendahara, Karyawan

III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan dan Tahapan Penelitian

Adapun rancangan dan tahapan penelitian digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Rancangan Tahap Penelitian

Adapun penjelasan dari gambar tentang rancangan dan tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap ke-1 Teori/Konsep, Evaluasi dan best practice

Pada tahap ke-1, penulis mengkaji secara literatur tentang permasalahan yang ada serta melihat aplikasi bum des yang sudah ada

2. Tahap ke-2 Rancangan awal model aplikasi

Pada tahap ke-2, penulis mengimplementasi rancangan desain aplikasi dari hasil analisis kebutuhan dari permasalahan dan panduan BUM DES yang ada.

3. Tahap ke-3 Pengujian desain melalui kuesioner

Pada tahap ke-3, penulis melakukan pengujian untuk mendapatkan umpan balik dari user.

4. Tahap ke-4 Analisis pengujian dan evaluasi

Pada tahap ke-4, akan dilakukan analisis dan evaluasi dari hasil pengujian terhadap desain rancangan yang telah dibuat.

5. Tahap ke 5 Kesimpulan dan saran

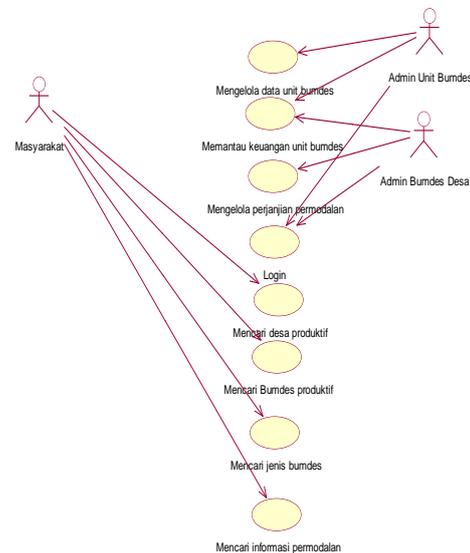
Pada tahap ke-5, akan ditarik kesimpulan dan saran dari hasil umpan balik kuesioner

Adapun jumlah sampel yang diambil adalah minimal 30 orang. Adapun subjek responden meliputi masyarakat umum seperti orang yang tinggal di desa sebagai objek utama, perkotaan sebagai penanam

modal. Adapun responden yang diambil adalah 40 orang.

3.2 Use Case Diagram

Dalam visualisasi use case diagram aplikasi terdapat 3 stakeholder utama. Yaitu masyarakat/pemodal, admin unit desa dan admin bumdes desa. Dalam perancangan desain *village entrepreneurship*, merupakan desain awal rancangan versi 1.0. Aplikasi ini akan terus dikembangkan sampai mencakup kebutuhan keseluruhan masing-masing stakeholder. Rancangan aplikasi ini masih berfokus pada sistem pencarian dan permodalannya.



Gambar 3 Use Case Diagram Aplikasi

3.1 Pengujian Sistem

Pengujian desain sistem menggunakan pengujian antarmuka menggunakan pengujian antarmuka pengguna dari metode Pressman dengan bantuan pengukuran skala *Likert*. Pengujian antarmuka menggunakan 4 aspek yaitu interaktivitas, estetika, tata letak, dan personalisasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil secara umum antarmuka utama aplikasi *village entrepreneurship* ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4 Antarmuka Utama



Pada antarmuka utama terdiri dari empat menu utama dan dijelaskan secara rinci pada tabel 1.

Tabel 1 Fasilitas Antarmuka Utama

No	Fasilitas Antarmuka	Fungsi
1	Desa produktif	Pada navigasi pencarian desa produktif, masyarakat atau pemodal bisa mencari desa yang akan diajak kerjasama baik dalam hal permodalan atau jual beli. Desa produktif didasarkan atas banyaknya unit usaha yang ada di desa
2	Unit Bumdes Produktif	Pada unit Bumdes produktif, masyarakat atau pemodal bisa mencari unit bumdes yang memiliki popularitas banyaknya jumlah kerjasama atau keuntungan unit per tahun
3	Jenis Bumdes	Pada navigasi jenis bumdes, masyarakat atau pemodal bisa mencari kerjasama jenis bumdes tertentu missal dibidang pertanian, perkebunan atau persawahan atau yang lain.
4	Permodalan	Pada navigasi permodalan, ditujukan untuk para pemodal yang ingin menjalin kerjasama dengan unit bumdes dengan menawarkan modal yang mereka punya dan unit bumdes yang menawarkan kerjasama ke pemodal untuk menanamkan modalnya ke unitnya. Untuk memberikan rekomendasi terbaik maka navigasi tanam modal diurutkan berdasarkan jumlah modal yang diberikan pemodal. Semakin besar modal yang ingin disalurkan, posisi kemunculan paling atas. Disisi lain, untuk butuh modal yang diisi oleh unit bumdes yang membutuhkan tambahan modal diurutkan berdasarkan jumlah modal yang dibutuhkan



Gambar 5 Antarmuka Navigasi Desa Produktif

Pada navigasi desa produktif akan ditampilkan 5 desa dengan unit usaha bumdes tertinggi. Gambaran antarmuka ditunjukkan pada gambar 5.



Gambar 6 Antarmuka Navigasi Unit Bumdes Produktif

Pada navigasi unit bumdes produktif akan ditampilkan 3 unit usaha bumdes tertinggi berdasarkan jumlah kerjasama tertinggi dan keuntungan setiap tahunnya. Gambaran antarmuka ditunjukkan pada gambar 6

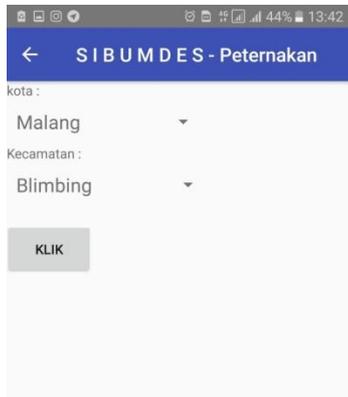
Pada navigasi jenis bumdes, akan ditampilkan beberapa pengelompokkan jenis bumdes seperti bidang peternakan, perkebunan, perikanan dan jenis lainnya. Penguuna (masyarakat atau pemodal) bisa mencari unit bumdes berdasarkan kota dan kecamatannya. Dalam aplikasi ini diberikan percontohan kota yang ada di



jawa timur. Gambaran antarmuka ditunjukkan pada gambar 7 dan gambar 8.

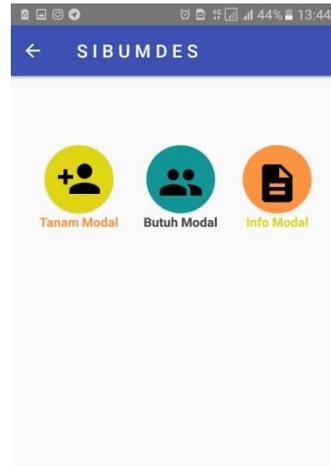


Gambar 7 Antarmuka Navigasi Jenis Bumdes

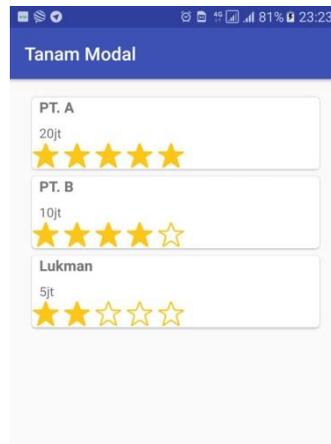


Gambar 8 Antarmuka Navigasi Jenis Bumdes berdasarkan wilayah

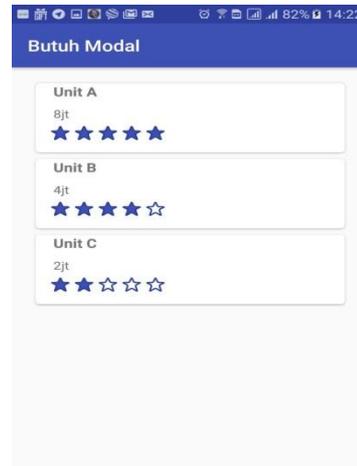
Pada navigasi permodalan, ada dua menu utama yaitu tanam modal dimana para pemodal bisa login dan menampilkan modal yang mereka tawarkan untuk kerjasama bagi unit bumdes yang mau. Disisi lain, navigasi butuh modal merupakan menu yang menampilkan unit-unit yang sedang membutuhkan sejumlah modal tertentu yang mereka butuhkan pada para pemodal yang mau diajak kerjasama. Gambaran antarmuka ditunjukkan pada Gambar 9, Gambar 10 dan Gambar 11.



Gambar 9 Antarmuka Navigasi Permodalan



Gambar 10 Antarmuka Navigasi Tanam Modal

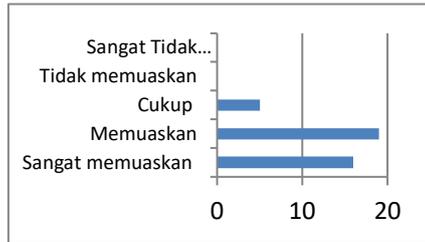


Gambar 11 Antarmuka Navigasi Butuh Modal

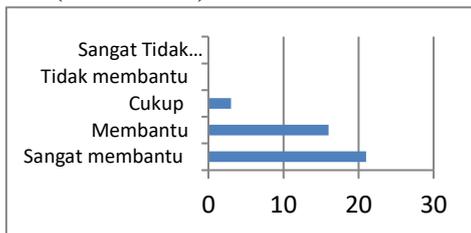
B. Pengujian Sistem

B.1 Navigasi Desa Produktif

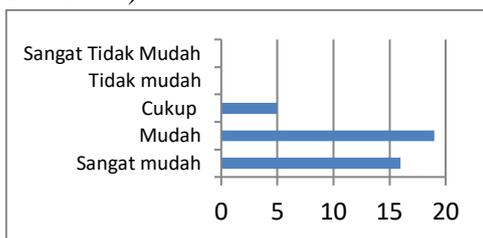
1. Bagaimana pendapat anda terkait dengan tampilan antarmuka utama (Gambar 4)? apakah memuaskan?



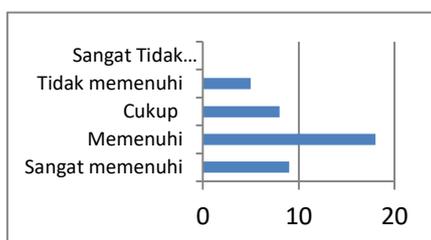
2 Apakah tata letak navigasi/ menu pencarian di antarmuka utama membantu anda dalam melakukan pencarian desa produktif dan permodalan secara cepat sesuai dengan keinginan anda (Gambar 4)?



3 Apakah tata letak navigasi/ menu pencarian di antarmuka utama mudah dipahami untuk melakukan pencarian (Gambar 4)?

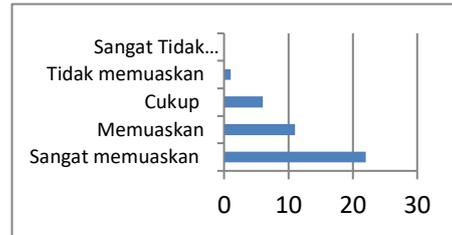


4. Bagaimana menurut anda fitur-fitur pengelompokkan kategorisasi pencarian yang ada di menu antarmuka utama (Gambar 4)?, apakah sudah mengakomodir kebutuhan anda?

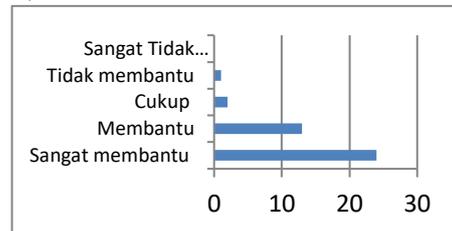


B.2 Navigasi Unit Bumdes Produktif

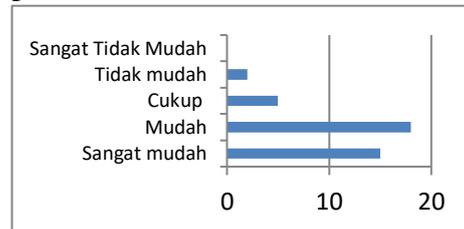
1. Bagaimana pendapat anda terkait dengan tampilan antarmuka unit bumdes produktif (Gambar 5 dan 6)? apakah memuaskan?



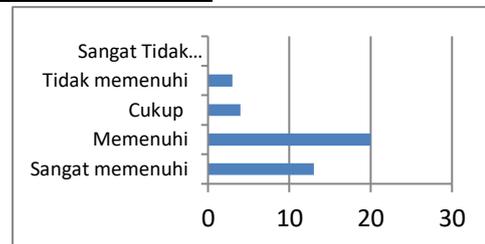
2 Apakah tata letak navigasi/ menu pencarian di antarmuka unit bumdes produktif membantu anda dalam melakukan pencarian unit bumdes produktif secara cepat sesuai dengan keinginan anda (Gambar 5 dan 6)?



3 Apakah tata letak navigasi/ menu pencarian di unit bumdes produktif mudah dipahami untuk melakukan pencarian (Gambar 5 dan 6)?

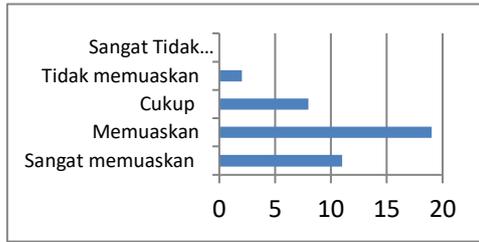


4 Bagaimana menurut anda fitur-fitur pengelompokkan kategorisasi pencarian yang ada di menu unit bumdes produktif (Gambar 5 dan 6)? apakah sudah mengakomodir kebutuhan anda?

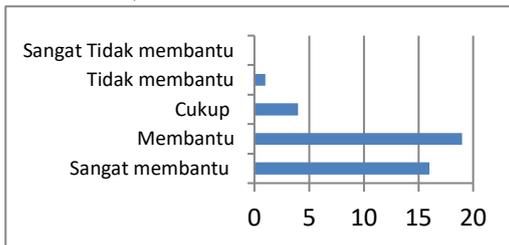


B.3 Navigasi Pencarian Bumdes Tertentu

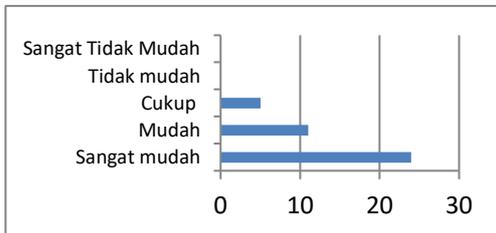
1. Bagaimana pendapat anda terkait dengan tampilan antarmuka pencarian bumdes tertentu (Gambar 7 dan Gambar 8)? apakah memuaskan?



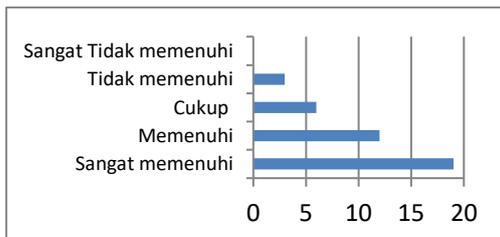
2 Apakah tata letak navigasi menu antarmuka pencarian bumdes tertentu membantu anda dalam melakukan pencarian informasi secara cepat sesuai dengan keinginan anda (Gambar 7 dan Gambar 8)?



3 Apakah tata letak navigasi/ menu pencarian di antarmuka pencarian bumdes tertentu mudah dipahami untuk melakukan pencarian (Gambar 7 dan Gambar 8)?

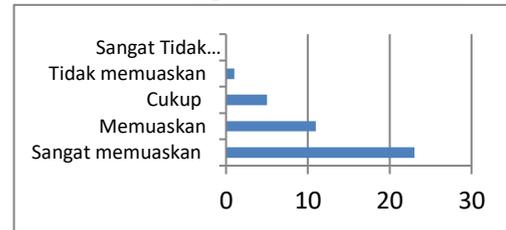


4. Bagaimana menurut anda fitur-fitur pengelompokkan kategorisasi pencarian yang ada di antarmuka pencarian bumdes tertentu (Gambar 7 dan Gambar 8)?, apakah sudah mengakomodir kebutuhan anda?

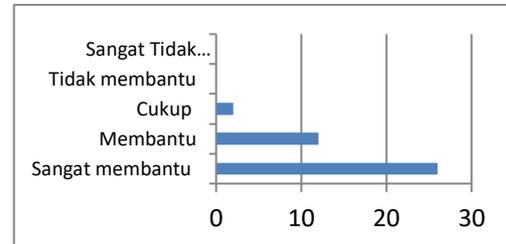


B.4 Navigasi Permodalan

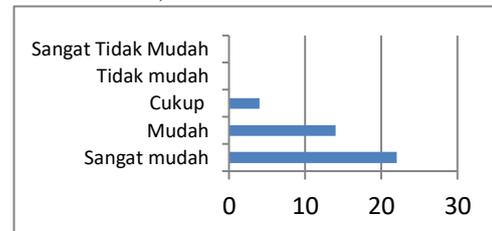
1 Bagaimana pendapat anda terkait dengan tampilan antarmuka permodalan (Gambar 9, Gambar 10, Gambar 11)? apakah memuaskan?



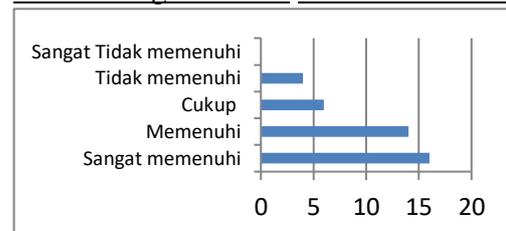
2 Apakah tata letak navigasi/ menu pencarian di antarmuka permodalan membantu anda dalam melakukan pencarian permodalan bum des secara cepat sesuai dengan keinginan anda (Gambar 9, Gambar 10, Gambar 11)?



3 Apakah tata letak navigasi/ menu pencarian di antarmuka permodalan mudah dipahami untuk melakukan pencarian (Gambar 9, Gambar 10, Gambar 11)?



4 Bagaimana menurut anda fitur-fitur pengelompokkan kategorisasi antarmuka permodalan (Gambar 9, Gambar 10, Gambar 11)?, apakah sudah mengakomodir kebutuhan anda?



Adapun analisis hasil angket sebagai berikut:



$$AK = \frac{s}{m \times n} + 100\%$$

Dengan

AK= Prosentase pencapaian angket secara klasikal

s=Jumlah skor dari keseluruhan angket

m= Skor maksimum angket

n= Banyaknya responden

Adapun jumlah prosentase responden yang menjawab sangat memuaskan atau skala 5 untuk 16 pertanyaan dengan 40 responden adalah 293 responden. Maka perhitungan sebagai berikut:

$$AK = \frac{293 \times 5}{(16 \times 5) \times 40} + 100\%$$

$$= \frac{1465}{3200} + 100\%$$

$$= 45,78\%$$

Dari perhitungan diatas bisa diambil kesimpulan yang menjawab sekali 4 yaitu memuaskan sebanyak 45,78%.

Adapun jumlah prosentase responden yang menjawab memuaskan atau skala 4 untuk 16 pertanyaan dengan 40 responden adalah 246 responden. Maka perhitungan sebagai berikut:

$$AK = \frac{246 \times 4}{(16 \times 4) \times 40} + 100\%$$

$$= \frac{984}{2560} + 100\%$$

$$= 38,43\%$$

Dari perhitungan diatas bisa diambil kesimpulan yang menjawab sekali 4 yaitu memuaskan sebanyak 38,43%.

Kesimpulan secara umum diambil dari menggabungkan prosentase responden yang menjawab secara umum sangat memuaskan atau skala 5 dan memuaskan skala 4 yaitu sebesar 84,21%. Hal ini karena jawaban skala 4 dan skala 5 dianggap positif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil timbal balik rancangan *village entrepreneurship* sebesar 84,21% dengan penggabungan skala 4 dan skala 5 karena dianggap sebagai jawaban yang positif yaitu sangat memuaskan dan memuaskan sehingga bisa diambil kesimpulan hasil pengujian terhadap sistem yang dibuat sangat positif

Aplikasi ini dikembangkan lagi pada sisi aplikasi keuangan Bumdes. Bagian keuangan merupakan hal yang paling sensitif dan menjadi isu utama sebagai penghalang keterbukaan hasil usaha antara desa dan masing-masing pengelola unit Bum des atau masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini secara finansial didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui program hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun pelaksanaan 2018

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2017. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2013-2016*. Semarang: Badan Pusat Statistik.
- Buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUM Des). 2007. Departemen Pendidikan Nasional Pusat kajian dinamika system pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang
- Farokhah lia, "Perancangan Prototype Public Information Service Bidang Pendidikan Berbasis Citizen centric (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Prof. Dr. Ir. Zoe'raini Djamal Irwan, M.Si., 2004, *Tantangan Lingkungan & Lansekap Kota*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- R. S. Pressman, *Rekayasa Perangkat Lunak*, Buku 1 Edi. Yogyakarta: Andi Publisher, 2012.
- Suryawati Chriswardani, 2005, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", *Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129)



Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
Widjaja. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-undnag Nomor*

22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.